

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM KOMUNIKASI DAN HEGEMONI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

¹Taufiq Hidayah Tanjung, ²Iskandar Zulkarnain, ³Mailin

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

¹taufiqhidayah4004233021@uinsu.ac.id, ²iskandar.zulkarnain@usu.ac.id,

³mailin@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to explore the ideas of Ibn Khaldun, particularly his concept of asabiyyah (group solidarity), in the context of political communication and hegemony in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, the research investigates the relevance of Ibn Khaldun's theories to the contemporary political dynamics of Indonesia, which are often influenced by social solidarity in the preservation of political power. The research methodology employed is library research, where data is collected from various sources including books, academic journals, and articles that discuss Ibn Khaldun's political theories and their application in Indonesia. The data analysis technique used is byat analysis, which involves categorizing and interpreting the data to identify similarities and differences in the viewpoints presented. The findings of this study indicate that Ibn Khaldun's notion of asabiyyah, or group solidarity, offers valuable insights into the patterns of political communication and hegemony in Indonesia. The strength of social solidarity among groups, whether based on religion, ethnicity, or ideology, plays a crucial role in the stability and continuation of political power in the country. The research also reveals that overly dominant political communication within one group can potentially lead to social tensions, aligning with Ibn Khaldun's view that power based on the domination of a particular group will not endure for long. This theory provides a relevant perspective for understanding identity politics and social dynamics in contemporary Indonesia.

Keywords: *Ibn Khaldun's thought, Political Communication and Hegemony, Politics*

Pendahuluan

Abad pertengahan dalam sejarah Islam dikenal sebagai periode yang sarat dengan pemikiran dan gagasan dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satu tokoh besar pada masa itu adalah Ibnu Khaldun, seorang intelektual Islam yang sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran. Karya monumentalnya, *Muqaddimah*, menjadi bukti atas kontribusinya yang luar biasa di bidang sejarah, sosiologi, politik, dan peradaban. Melalui karya-karya tersebut, Ibnu Khaldun

menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap berbagai bidang ilmu, menjadikannya seorang pakar dalam sejarah, sosiologi, dan politik yang dihormati hingga saat ini. (Kamaruddin, 2015)

Dalam kehidupan pribadinya, Ibnu Khaldun menjalani petualangan yang menarik. Pada usia 20 tahun, ia memulai perjalanan politiknya di wilayah Maghreb yang pada saat itu tengah dilanda ketegangan politik dan perubahan besar. Ia aktif dalam politik sejak 750 Masehi dan menduduki berbagai jabatan penting,

termasuk anggota dewan ilmiah di Maghreb pada 756 Masehi. Ia juga menjabat sebagai hakim agung dan duta besar, yang menunjukkan kecakapan dan pengalamannya dalam banyak bidang. (Muhammad Jamil, et.al, 2024)

Fauzan Montanah, et.al. (2024) menyatakan pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal masyarakat, negara, dan peradaban memandang semua itu sebagai suatu proses yang dapat dianalisis melalui hukum-hukum sosial dan sejarah. Salah satu konsep kunci yang ia kemukakan adalah *asabiyyah*, yang merujuk pada solidaritas kelompok. *Asabiyyah* ini menjadi faktor utama dalam pembentukan dan keberlangsungan kekuasaan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa solidaritas yang kuat dalam kelompok sosial sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran negara. Namun, jika solidaritas ini mulai melemah, negara akan mengalami kemunduran dan akan digantikan oleh kelompok yang lebih kuat. Pemikiran ini juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam mempertahankan kekuasaan. (Fauzan Montanah, et.al, 2024)

Osin, et.al. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun tidak hanya melihat politik dari segi struktural negara, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Sebagai seorang

Muslim, ia mengajukan bahwa kebijakan publik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menciptakan keadilan sosial dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pandangannya ini menggabungkan observasi empiris dengan dimensi spiritual yang sangat relevan dalam penerapan pemerintahan yang adil dan bermoral. (Osin, et.al, 2024)

Di Indonesia, komunikasi politik dan hegemonisasi memiliki hubungan yang erat. Komunikasi politik berfungsi untuk membentuk opini publik dan memperkuat kekuasaan, terutama dengan munculnya media digital yang memperluas ruang untuk menyebarkan informasi. Namun, komunikasi politik sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat hegemonisasi, yaitu dominasi narasi dan ideologi oleh elite politik demi mempertahankan kekuasaan mereka. Konsep hegemonisasi ini sejalan dengan pandangan Antonio Gramsci, yang menekankan pentingnya kontrol ideologi dalam mengelola masyarakat dan politik.

Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan untuk menganalisis situasi politik di Indonesia, terutama terkait dengan *asabiyyah* dan siklus kekuasaan. Di Indonesia, komunikasi politik, yang semakin dipengaruhi oleh media sosial, dapat memperkuat atau menantang hegemonisasi politik. Fenomena seperti

hoaks, propaganda politik, dan polarisasi sosial menunjukkan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan, namun juga dapat memicu perpecahan sosial. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat membantu kita lebih memahami bagaimana solidaritas kelompok dan komunikasi berperan dalam dinamika politik Indonesia. (Kamaruddin, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap praktik komunikasi politik dan hegemonisasi di Indonesia. Melalui analisis lebih dalam mengenai asabiyyah dan siklus kekuasaan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami komunikasi politik di era modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks komunikasi politik

dan hegemonisasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), (Moleong, 2019) yang artinya pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur terkait yang membahas teori-teori Ibnu Khaldun, konsep asabiyyah, serta pengaruh komunikasi politik dan hegemonisasi dalam praktik politik di Indonesia. Peneliti akan menganalisis karya-karya utama Ibnu Khaldun, khususnya *Muqaddimah*, serta literatur lainnya yang menjelaskan penerapan pemikirannya dalam dinamika politik kontemporer Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan literatur yang membahas topik komunikasi politik, hegemonisasi, dan pemikiran Ibnu Khaldun. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis byat, di mana peneliti akan mengkaji dan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka untuk mencari kesamaan dan perbedaan pandangan, serta menginterpretasikan relevansi konsep-konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam konteks politik Indonesia. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan praktik komunikasi politik

dan hegemonisasi yang terjadi di Indonesia saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, nama lengkapnya adalah Abdurrahman Zaid Waliuddin bin Khaldun, lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun, nama kakeknya yang kesembilan yang bernama Khalid. Nama Khalid sendiri merupakan nenek moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama dengan penakluk berkebangsaan Arab yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Banu Khaldun. Asal usul dari Banu Khaldun sendiri berasal dari Hadhramaut Yaman selatan. Banu Khaldun tetap tinggal di Sevilla selama pemerintahan Umayyah dengan tidak mengambil peranan yang berarti sehingga datangnya pemerintahan raja-raja kecil (al-Thowalif) dan Sevilla berada dalam kekuasaan Ibnu Abbas. Pada masa itulah pengaruh Banu Khaldun meningkat lagi sampai pada masa pemerintahan Al-Muwahhidun. Setelah raja-raja Thowaif mengalami kemunduran, maka muncullah raja-raja Muwahhidin menggeser kekuasaan raja-raja Murabbith. (Muh. Sya[^]rani, 2021)

Ibnu Khaldun dikenal karena semangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, yang terlihat dari dedikasinya

dalam belajar dan berfikir. Keluarga Ibnu Khaldun juga terkenal dengan aspirasi politik yang tinggi, serta memiliki reputasi dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan. Konteks keluarga ini membentuk karakter dan perjalanan hidupnya yang berfokus pada pengetahuan, pemerintahan, serta kajian sosial dan sejarah. (Abd Mannan, et.al, 2023)

Ibnu Khaldun juga memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang seperti retorika, syair, filsafat, dan logika dari para ulama di Tunisia, yang menjadi pusat kegiatan ilmiah di kawasan Maghrib pada masa itu. Ibnu Khaldun tinggal bersama keluarganya di kota Carmon, Andalusia, yang saat itu menjadi tempat pengungsian bagi para ulama Andalusia. Selain dikenal sebagai seorang sejarawan, sosiolog, dan ahli ilmu politik, Ibnu Khaldun juga aktif menulis dan memberikan kontribusi penting dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan teologi. Ia diakui sebagai filsuf sejarah pertama di dunia berkat karya monumentalnya, *Muqaddimah*, yang memberikan analisis mendalam tentang sejarah, masyarakat, dan kekuasaan. (Fadila, et.al, 2025)

2. Bentuk Pemikiran Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks politik dan sosial sangat berfokus pada realitas dan pengalaman langsungnya dengan kekuasaan. Berbeda dengan para pemikir politik Muslim sebelumnya yang

cenderung mengembangkan konsep politik ideal, seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi yang banyak mengadopsi pemikiran Plato, Ibnu Khaldun lebih menekankan pada politik yang realistis. Ia memandang bahwa pemikiran politik harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Salah satu fokus utama dalam pemikirannya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan dan mencegah kemunduran negara. Menurutnya, sebuah negara bisa jatuh akibat adanya konflik internal, seperti ketidaksetiaan rakyat atau adanya pihak dalam negara yang berkolaborasi dengan pihak luar untuk meruntuhkan negara tersebut. Oleh karena itu, pemikiran politik Ibnu Khaldun dimulai dengan analisis terhadap konteks sosial, karena menurutnya, kedaulatan negara sangat bergantung pada solidaritas sosial rakyatnya. (Sulfan, et.al, 2021)

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kedaulatan suatu negara sangat bergantung pada hubungan sosial di dalamnya. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi antara pemimpin dan rakyatnya. Hal ini tercermin dalam salah satu kutipan dari *Muqaddimah*-nya yang menjelaskan bahwa kemenangan suatu negara atau pemerintahan tergantung pada seberapa kuat solidaritas sosial antara anggota masyarakatnya. Rakyat yang memiliki rasa keterikatan dan kepedulian

terhadap negara akan lebih siap berjuang dan berkorban untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun menekankan bahwa keberadaan dan kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekuatan pasukan atau pemerintahan semata, tetapi juga pada solidaritas dan keterikatan sosial yang dimiliki oleh rakyatnya. (Iqbal Muhammad Rodli, et.al, 2021)

3. Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Komunikasi Dan Hegemoni Politik Di Indonesia

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam komunikasi dan hegemoni politik dapat dilihat dalam konteks bagaimana kekuasaan dan struktur sosial saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sebuah negara hanya bisa bertahan jika ada solidaritas sosial yang kuat di kalangan rakyatnya. Menurutnya, kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan politik atau militer semata, tetapi lebih pada seberapa erat masyarakat dapat saling bergantung satu sama lain dan bagaimana hubungan sosial ini dapat menjaga stabilitas kekuasaan.

Pemikiran ini relevan untuk dianalisis dalam konteks politik identitas di Indonesia, yang berbeda dengan di Barat. (Idrus Ruslan, et.al, 2022)

Idrus Ruslan, et.al. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa politik

identitas di Barat cenderung muncul sebagai bentuk perjuangan kelompok yang merasa didiskriminasi oleh negara, seperti gerakan hak-hak kulit hitam atau kesetaraan gender. Sebaliknya, di Indonesia, politik identitas seringkali dipraktikkan oleh kelompok mayoritas, seperti kelompok agama, dengan tujuan untuk mendiskreditkan kelompok minoritas yang dianggap "menyimpang". Hal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh negara, sehingga menciptakan ketegangan sosial yang besar. Juhana Nasruddin menyoroiti bahwa isu identitas etnis dan agama, yang sering muncul dalam pemilihan umum di Indonesia, memperlihatkan bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan bahkan menggerus kualitas demokrasi di negara tersebut. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai solidaritas sosial dan kekuasaan yang saling berkaitan memberikan perspektif penting dalam melihat bagaimana hegemoni politik dan komunikasi dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia. (Juhana Nasrudin, 2018)

Asmah Kadir, et.al. (2024) bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang *ashabiyah* atau solidaritas kelompok dapat diterjemahkan dalam konteks komunikasi dan hegemoni politik di Indonesia. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekuatan

politik yang bertahan lama biasanya didasarkan pada komunikasi yang solid antara anggota kelompok atau masyarakat. Menurutnya, komunikasi baik dalam bentuk interaksi sosial yang terjalin melalui kesamaan ras, agama, atau kepentingan merupakan dasar penting dalam pembentukan negara dan pengelolaan kekuasaan. Di Indonesia, konsep ini sangat relevan, terutama ketika kita melihat hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam politik. Kelompok mayoritas baik yang berdasar pada agama, etnis, atau golongan sering kali membentuk komunikasi yang kokoh untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Komunikasi ini memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi alat yang sangat penting untuk memperkuat solidaritas tersebut, baik melalui media massa, media sosial, maupun kampanye politik. Kelompok-kelompok ini mampu memobilisasi dukungan massa dan menciptakan narasi yang menguntungkan mereka, menciptakan dominasi dalam proses politik.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, komunikasi yang terlalu kuat dalam satu kelompok bisa menjadi kekuatan yang destruktif jika dibiarkan berkembang tanpa kendali.

Ketika suatu kelompok atau golongan merasa terlalu dominan, maka akan terjadi penindasan terhadap kelompok lainnya, yang akhirnya menciptakan ketegangan dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, ini tercermin dalam adanya ketegangan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas, baik itu berdasarkan agama, suku, maupun identitas lainnya. Hegemoni politik, dalam hal ini, menjadi alat untuk menjaga kestabilan kelompok mayoritas dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Kelompok yang lebih kuat dalam komunikasi ini dapat mendominasi kebijakan politik dan bahkan merubah arah negara sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, Ibnu Khaldun juga mengingatkan bahwa kekuatan yang terlalu lama didasarkan pada komunikasi yang sangat dominan akan mengalami kemunduran, karena kontrol yang sangat kuat akan cenderung membebani sistem politik, mengarah pada ketidakstabilan, dan menurunnya legitimasi kekuasaan. (Asmah Kadir, et.al, 2024)

Kamaruddin. (2015) menjelaskan Ibnu Khaldun mengenai *ashabiyah* atau solidaritas kelompok sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks komunikasi dan hegemoni politik di Indonesia. Dalam pandangannya, *ashabiyah* adalah kekuatan yang menggerakkan masyarakat dan negara, yang didorong oleh rasa persatuan dan solidaritas yang kuat antara anggota

kelompok. Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa kita lihat pada bagaimana kelompok-kelompok tertentu, baik itu berdasarkan agama, etnis, atau ideologi, membangun komunikasi yang kokoh untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan utama dari *ashabiyah* adalah untuk mewujudkan kekuasaan (*al-mulk*), yang dapat memberikan perlindungan dan menciptakan stabilitas politik dalam sebuah negara. Dalam politik Indonesia, kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang dibangun oleh kelompok tertentu, baik yang berbasis etnis, agama, atau ideologi, dapat memperkuat posisi mereka dalam proses politik. Hal ini terlihat misalnya dalam kampanye politik, komunikasi politik yang dimediasi oleh media, atau dalam gerakan sosial yang mendukung kepentingan kelompok. (Kamaruddin, 2015)

Namun, menurut Ibnu Khaldun, *ashabiyah* bukan hanya berkaitan dengan komunikasi antar individu dalam suatu kelompok, tetapi juga dapat terkait dengan kekuatan agama. Agama, dalam pemikiran Ibnu Khaldun, adalah kekuatan yang mendukung dan memperkuat *ashabiyah*. Di Indonesia, agama memiliki peranan penting dalam membentuk solidaritas kelompok dan memobilisasi dukungan dalam politik. Misalnya, kelompok-kelompok keagamaan

tertentu sering menggunakan agama sebagai alat untuk membangun identitas kolektif dan untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Dalam kaitannya dengan idealisme dan realisme, Ibnu Khaldun menolak pandangan idealistik yang berlebihan, seperti yang diajarkan oleh sebagian kalangan Sufi yang mengharapkan kedatangan seorang pemimpin (Imam Mahdi) untuk menyelamatkan masyarakat. Sebaliknya, Ibnu Khaldun lebih menekankan pentingnya pemahaman terhadap realitas sosial yang ada dan bagaimana *ashabiyah* dapat diarahkan untuk menciptakan kestabilan politik yang alami. Di Indonesia, ini juga dapat diartikan bahwa kita harus lebih fokus pada kondisi sosial yang nyata, bukan hanya pada harapan akan datangnya perubahan besar melalui pemimpin tunggal, tetapi dengan upaya membangun solidaritas yang sehat dan berkelanjutan di antara berbagai kelompok. (Kamaruddin, 2015)

4. Pendapat Siti Musdah Mulia dalam Pendekatan Ibnu Khaldun

Siti Musdah Mulia merupakan wanita pertama yang diangkat menjadi profesor riset pertama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Musdah Mulia juga merupakan seorang aktivis hak perempuan Indonesia. Di samping itu Musdah juga seorang Profesor Agama yang sudah banyak mengeluarkan pendapat isu-isu moderat tentang agama Islam.

Siti Musdah Mulia kerap menekankan pentingnya perubahan struktural dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender, termasuk di bidang politik. Dalam pendekatan analitis Ibnu Khaldun, kita dapat melihat beberapa prinsip dalam visinya tentang komunikasi dan politik perempuan di Indonesia.

'Asabiyah dan solidaritas perempuan: Musdah Mulia bahwa perempuan harus membangun *asabiyah*, artinya kekuatan yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam politik. Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial dalam diri sangat penting dalam konstruksi kekuasaan politik. Musdah Mulia mendukung gerakan perempuan yang aktif dengan kesadaran bahwa perjuangan perempuan untuk kesetaraan memerlukan kekuatan kolektif yang terorganisir. Ia meyakini komunikasi efektif antar perempuan dalam jaringan organisasi dan partai politik dapat memperkuat *'asabiyah* dan memperjuangkan keadilan politik.

Hegemoni Politik dan Ketidaksetaraan dalam Struktur Kekuasaan. Menurut Musdah Mulia, ia juga menyadari bahwa meskipun perempuan berhasil membuat kemajuan dalam politik Indonesia, hegemoni politik yang didominasi oleh laki-laki tetap sangat kuat. Mengacu pada teori Ibnu Khaldun, hegemoni ini terbentuk

oleh sejarah panjang ketidaksetaraan, yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam struktur sosial dan politik. Musdah Mulia mengkritik kenyataan bahwa meskipun ada kemajuan, seperti peningkatan jumlah perempuan yang menduduki posisi kekuasaan, akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan yang penting masih terbatas oleh struktur kekuasaan patriarkal yang tertanam dalam politik Indonesia.

Perubahan Sosial dan Komunikasi dalam Politik: Musdah Mulia berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat Indonesia membutuhkan perubahan paradigma sosial, yang dimulai dengan pendidikan dan komunikasi. Menurut analisis Ibnu Khaldun, perubahan sosial terjadi melalui transformasi solidaritas kelompok dan pengaruh generasi baru.

Musdah Mulia memandang media sebagai alat yang sangat untuk memperkuat suara perempuan dan membongkar hegemoni. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, perempuan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang peran mereka dalam politik untuk memperjuangkan kesetaraan yang lebih besar.

Kesimpulan

Kesimpulannya, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai solidaritas sosial atau ashabiyah

sangat relevan untuk memahami dinamika politik dan sosial di Indonesia, terutama dalam konteks komunikasi dan hegemoni politik. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekuatan politik atau militer, tetapi lebih pada seberapa kuat hubungan sosial di dalamnya. Konsep ashabiyah yang mengedepankan solidaritas antar kelompok memberikan dasar bagi kelompok-kelompok tertentu di Indonesia, baik berbasis agama, etnis, atau ideologi, untuk membangun komunikasi yang solid dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk politik identitas, di mana kelompok mayoritas memanfaatkan komunikasi untuk memperkuat posisi mereka dalam politik, ekonomi, dan sosial.

Namun, Ibnu Khaldun juga mengingatkan bahwa dominasi suatu kelompok yang terlalu kuat dapat berujung pada ketegangan dan ketidakadilan sosial, serta mengarah pada kemunduran sistem politik. Oleh karena itu, meskipun komunikasi yang solid antar kelompok dapat memperkuat solidaritas, penting untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi penindasan terhadap kelompok minoritas. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam ketegangan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang seringkali dipicu oleh politik identitas. Dengan memahami pemikiran Ibnu Khaldun, kita

dapat melihat pentingnya membangun komunikasi yang sehat dan berkelanjutan antar kelompok untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial yang lebih inklusif.

References

- Abd Mannan, et.al. (2023). *Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Kontruksi Pendidikan Agama Islam*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan: 5 (2).
- Asmah Kadir, et.al. (2024). Ashabiyah Ibn Khaldun Dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia. *Jurnal Siyasatunah*, 5 (1).
- Fadila, et.al. (2025). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Pembelajaran Sejarah: Systematic Literature Review. *Ideguru : Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10 (1).
- Fauzan Montanah, et.al. (2024). Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2 (3).
- Idrus Ruslan, et.al. (2022). Politik Identitas Dan Tantangan Hubungan Antar Agama Di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 17 (2).
- Iqbal Muhammad Rodli, et.al. (2021). Konsep Negara Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Review Politik*, 11 (2).
- Juhana Nasrudin. (2018). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2 (1).
- Kamaruddin. (2015). PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN DAN PEMBENTUKAN TEORI SOSIOLOGI POLITIK. *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 16 (2).
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh. Sya'rani. (2021). Konsep Pendidikan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*, 6 (1).
- Muhammad Jamil, et.al. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam: Warisan Intelektual Dari AL-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Hingga Ibnu Khaldun. *Jurnal syiar-syiar*, 8 (28).
- Osin, et.al. (2024). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Konteks Etika Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8 (6).
- Sulfan, et.al. (2021). Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Tana Mana*, 2 (2).